

CIVIL SOCIETY DAN DEMOKRASI

I. Apa Yang Dimaksud Civil Society?

Civil society atau masyarakat madani merupakan konsep yang memiliki banyak arti dan sering dimaknai secara berbeda. Namun semua ahli sepakat bahwa harus ada partisipasi yang bersifat sukarela dari sebagian warga masyarakat, tidak termasuk perilaku yang dilakukan karena keterpaksaan. Beberapa ahli juga menyepakati adanya aktivitas politik melalui lembaga-lembaga nonprofit semacam *nongovernment organization* (NGO).

Sejarah *civil society* pada awalnya merupakan konsep sekuler karena adanya penentangan ilmuwan pada kekuasaan gereja (yang absolut) di abad pertengahan. Kemudian berlanjut pada lahirnya sikap liberal yang mengakui hak-hak individu untuk mengartikulasikan otonomisasi di setiap pilihan-pilihan hidupnya. Akibat adanya sikap liberal ini maka ia membutuhkan ruang umum (*public sphere*) dan jaminan hukum (*law*) serta public discourse. Karena itu, berbicara civil – dengan segala variannya – tentu meniscayakan adanya “lahan atau ruang” (sebagai basis kognitif) dan “nilai-nilai” (sebagai basis petunjuk dan harapan), serta tentu saja kesiapan rasional yang argumentatif.¹

Lahan civil society sendiri dapat berupa negara (*law-governed state*) atau kesepakatan-kesepakatan rasional masyarakat. Sementara nilai-nilai (*values*) dapat berasal dari agama (religi), suku (tribal), ras, etnos, ideologi, dan pengetahuan.

Tumbuhnya *civil society* memiliki kaitan yang amat signifikan terhadap tumbuhnya rejim-rejim yang mengusung demokrasi sebagai paham dan ideologinya. Dalam paham demokrasi pemerintah menyediakan kesempatan yang sangat luas kepada semua individu dalam lapangan ekonomi dan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan warga negara membuat masyarakat memiliki posisi tawar terhadap kebijakan pemerintah.

¹<http://www.simpuldemokrasi.com/dinamika-demokrasi/wacana-demokrasi/1309-civil-society-dan-demokrasi-di-indonesia.html>

II. Kriteria Civil Society

Beberapa kriteria yang dapat dijadikan parameter untuk merujuk masyarakat madani adalah²

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga dan kelompok dalam masyarakat
- 2) Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
- 3) Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
- 4) Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
- 5) Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
- 6) Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
- 7) Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.

III. Civil Society di Indonesia

Dari uraian di atas pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan upaya pembentukan civil society di Indonesia. Upaya demokratisasi yang sedang berlangsung di negara kita patut untuk disyukuri. Namun ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi yaitu

1. Demokratisasi tidak identik dengan liberalisasi apalagi westernisasi, sebab pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki nilai, norma dan akar budaya

² *Ibid.*

dengan bangsa-bangsa Barat sehingga westernisasi yang liberal pasti tidak akan cocok dengan bangsa kita.

2. Masyarakat harus mulai memahami bahwa demokratisasi tidak berarti bahwa masyarakat bebas sebebaskan-bebasnya. Kebebasan yang diusung haruslah kebebasan yang bertanggungjawab.
3. Demokratisasi tidak mesti pemungutan suara. Pemungutan suara tidak menggambarkan aspirasi seluruh masyarakat, namun hanya aspirasi dari sebagian besar masyarakat. Bagi masyarakat yang sedang dalam proses demokratisasi kalah dalam pemungutan suara dapat menumbuhkan rasa dendam, tidak puas yang kemudian menimbulkan anarkhis.
4. NGO harus berbuat jujur dan tidak hanya sekedar berani melawan pemerintah. NGO sebaiknya tampil sebagai pembela hak-hak masyarakat.